

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas PMD dengan Bupati Gresik tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	91% < 100%	Sangat Tinggi
2.	76% < 90%	Tinggi
3.	66% < 75%	Sedang
4.	51% < 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

Capaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut:

TAHUN 2021-2026

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai Permendes No. 2 tahun 2016	82.12%	100%	Sangat Tinggi

TAHUN 2025-2029

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa	Return of aset usaha desa (Bumdesa dan kopertasi merah putih) (%)	2.09%	11.47%	Sangat Tinggi
	Rasio Pendapatan asli Desa (Rasio)	0.0542	0.08	Sangat Tinggi
	Persentase desa mandiri (%)	47.58%	100%	Sangat Tinggi
	Return og investment usaha desa (Bumdesa dan koperasi merah putih)	25.29%	25.66%	Sangat Tinggi

Capaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut:

TAHUN 2025-2029

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan desa	Indeks profesionalitas aparatur pemerintah desa (indeks)	60	62.05	Sangat Tinggi
Meningkatkan keberdayaan multidimensi kemasyarakatan desa	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan desa (%)	92.81%	97.56%	Sangat Tinggi
	Rasio jaminan sosial ketenagakerjaan ekosistem desa (rasio)	0.84	0.97	Sangat Tinggi

Berdasarkan Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dengan capaian kinerja di kategori “Sangat Tinggi” dengan persentase Realisasi 100%.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021-2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	82.12%	100 %	100%	Sangat Tinggi Data 2025

TAHUN 2025-2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa	Return of aset usaha desa (Bumdesa dan kopertasi merah putih) (%)	2.09%	11.47%	100%	Sangat Tinggi Data 2025
	Rasio Pendapatan asli Desa (Rasio)	0.0542	0.08	100%	Sangat Tinggi Data 2025
	Persentase desa mandiri (%)	47.58%	100%	100%	Sangat Tinggi Data 2025
	Return og investment usaha desa (Bumdesa dan koperasi merah putih)	25.29%	25.66%	100%	Sangat Tinggi Data 2025

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025-2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan desa	Indeks profesionalitas aparatur pemerintah desa (indeks)	60	62.05	100%	Sangat Tinggi Data 2025
Meningkatkan keberdayaan multidimensi kemasyarakatan desa	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan desa (%)	92.81%	97.56%	100%	Sangat Tinggi Data 2025
	Rasio jaminan sosial ketenagakerjaan ekosistem desa (rasio)	0.84	0.97	100%	Sangat Tinggi Data 2025

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2024)

TAHUN 2021-2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	KETERANGAN
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	100%	100 %	Meningkat

TAHUN 2025-2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa	Return of aset usaha desa (Bumdesa dan kopertasi merah putih) (%)	0	11.47%	Meningkat
	Rasio Pendapatan asli Desa (Rasio)	0	0.08	Meningkat
	Persentase desa mandiri (%)	0	100%	Meningkat
	Return og investment usaha desa (Bumdesa dan koperasi merah putih)	0	25.66%	Meningkat

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2024)

TAHUN 2025-2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan desa	Indeks profesionalitas aparatur pemerintah desa (indeks)	0	62.05	Meningkat
Meningkatkan keberdayaan multidimensi kemasyarakatan desa	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan desa (%)	0	97.56%	Meningkat
	Rasio jaminan sosial ketenagakerjaan ekosistem desa (rasio)	0	0.97	Meningkat

Sumber: subbagian program dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025).

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KETERANGAN
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	89.96%	100 %	Sanagt Baik

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa	Return of aset usaha desa (Bumdesa dan kopertasi merah putih) (%)	2.24%	11.47%	Sanagt Baik
	Rasio Pendapatan asli Desa (Rasio)	0.0542	0.08	Sanagt Baik
	Persentase desa mandiri (%)	47.58%	100%	Sanagt Baik
	Return og investment usaha desa (Bumdesa dan koperasi merah putih)	25.51%	25.66%	Sanagt Baik

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan desa	Indeks profesionalitas aparatur pemerintah desa (indeks)	64	62.05	Sanagt Baik
	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan desa (%)	92.26%	97.56%	Sanagt Baik
Meningkatkan keberdayaan multidimensi kemasyarakatan desa	Rasio jaminan sosial ketenagakerjaan ekosistem desa (rasio)	0.86	0.97	Sanagt Baik

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PROVINSI JAWA TIMUR 2021-2026	KABUPATEN LAMONGAN 2021-2026	LEBIH TINGGI/RENDAH
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	88%	79.69%	Lebih Tinggi

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PROVINSI JAWA TIMUR 2021-2026	KABUPATEN LAMONGAN 2025-2029	LEBIH TINGGI/RENDAH
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa	Return of aset usaha desa (Bumdesa dan kopertasi merah putih) (%)	9.3%	7%	Lebih Tinggi
	Rasio Pendapatan asli Desa (Rasio)	0.08	0.12	Lebih Tinggi
	Persentase desa mandiri (%)	35%	91%	Lebih Tinggi
	Return og investment usaha desa (Bumdesa dan koperasi merah putih)	8%	10%	Lebih Tinggi

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PROVINSI JAWA TIMUR 2021-2026	KABUPATEN LAMONGAN 2025-2029	LEBIH TINGGI/RENDAH
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan desa	Indeks profesionalitas aparatur pemerintah desa (indeks)	59	59	Lebih Tinggi
	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan desa (%)	85%	92%	Lebih Tinggi
Meningkatkan keberdayaan multidimensi kemasyarakatan desa	Rasio jaminan sosial ketenagakerjaan ekosistem desa (rasio)	0.65	0.75	Lebih Tinggi

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Nasional / Prov. Jatim / Kab. Kota lain Lamongan dengan keterangan Lebih Tinggi.

E. ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ANALIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN 2021-2026	SOLUSI
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	- Kapasitas SDM Desa: Variasi kapasitas perangkat desa dalam mengelola dana desa dan administrasi. - Ketimpangan Pembangunan: Tantangan dalam meratakan pembangunan, terutama di wilayah pesisir atau pulau terpencil (Bawean). - Administrasi dan Pelaporan: Risiko keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa.	- Peningkatan kapasitas (pelatihan/bimtek), digitalisasi administrasi, dan pendampingan intensif untuk mendorong kemandirian desa. - Revitalisasi infrastruktur bawean, penguatan ekonomi berbasis local, transformasi digital desa dan bantuan perumahan untuk meningkatkan standard hidup masyarakat pesisir. - Melakukan penerapan strategis digitalisasi dan pendampingan intensif.

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ANALIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN 2025-2029	SOLUSI
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa	Return of aset usaha desa (Bumdesa dan kopertasi merah putih) (%)	ketidakseimbangan antara nilai aset yang besar dengan profitabilitas yang dihasilkan	- Audit dan klasifikasi aset - penerapan model bisnis asset – light - profesionalisme pengelola - digitalisasi pemasaran dan operasional diversifikasi produk yang high-margin.

E. ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ANALIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN 2025-2029	SOLUSI
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa	Rasio Pendapatan asli Desa (Rasio)	1.Struktur anggaran desa di Gresik masih didominasi oleh dana dari pusat dan kabupaten, sehingga dorongan untuk menggali potensi lokal menjadi kurang prioritas 2.Banyak BUMDesa di Gresik yang belum mampu menyetorkan bagi hasil usaha ke rekening kas desa karena model bisnis yang tidak berkelanjutan atau aset yang belum produktif 3.Aset tanah kas desa (tanah bengkok) atau bangunan milik desa seringkali belum dikelola secara komersial yang menguntungkan 4.Des a belum mengoptimalkan pungutan desa yang sah, hasil swadaya, atau partisipasi masyarakat yang terukur secara administratif.	1.Kontribusi BUMDesa yang nyata (minimal 10-20% dari laba bersih) 2.Pengelolaan pasar desa atau tempat wisata yang mandiri. 3.Administrasi pungutan desa yang tertib dan transparan.
	Persentase desa mandiri (%)	1.Banyak desa di wilayah pesisir dan Bawean memiliki skor tinggi di dimensi sosial dan ekonomi, namun rendah di dimensi lingkungan (misal: pengelolaan sampah, mitigasi bencana, dan sanitasi), yang menghambat kenaikan status menjadi Mandiri. 2.Des a Mandiri mensyaratkan ketahanan ekonomi. Jika BUMDesa gagal memberikan kontribusi signifikan (seperti yang dibahas sebelumnya), skor dimensi ekonomi akan sulit menembus batas minimum status Mandiri. 3.Perubahan personel di tingkat desa sering kali menyebabkan kelalaian dalam input data profil desa (Prodeskel) dan IDM, sehingga data yang terekam di pusat tidak mencerminkan kemajuan nyata di lapangan. 4.Kesenjangan akses internet di beberapa titik di Pulau Bawean menghambat digitalisasi pelayanan, yang merupakan salah satu poin penting dalam penilaian kemandirian desa.	1.Mengintegrasikan program Bupati (Gresik Baru) untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dasar di desa yang masih berstatus "Maju". 2.Pendampingan khusus bagi desa-desa "Maju" agar dapat memenuhi indikator spesifik yang kurang (misal: pengadaan ambulan desa atau peningkatan sarana olahraga). 3.Mendorong penggunaan aplikasi pelayanan publik untuk mendongkrak skor dimensi sosial dalam penilaian IDM. 4.Memastikan penggunaan Dana Desa 2025 difokuskan pada kegiatan yang memiliki bobot nilai tinggi dalam kriteria Desa Mandiri.

E. ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ANALIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN 2025-2029	SOLUSI
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa	Return of investment usaha desa (Bumdesa dan koperasi merah putih)	1. Risiko Gagal Bayar & Kebocoran: Secara nasional, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menghadapi risiko gagal bayar yang dipicu oleh potensi korupsi atau kebocoran anggaran yang cukup besar. Di Gresik, hal ini dimitigasi melalui pengawasan ketat agar tidak menjadi beban finansial bagi desa. 2. Kurangnya Kompetensi Manajerial: Terdapat kekhawatiran dari DPRD Gresik mengenai "gagal paham" pengurus dalam mengelola dana besar yang dikururkan untuk Kopdes Merah Putih, yang berisiko membuat investasi tidak kembali (ROI negatif). 3. Investasi pada Aset Tidak Produktif: Banyak BUMDesa terjebak pada pengadaan fisik (bangunan/alat) yang tidak segera menghasilkan pendapatan (idle assets), sehingga nilai penyusutan aset lebih besar daripada laba bersih yang dihasilkan. 4. Ketergantungan Kebijakan: Unit usaha seringkali terlalu bergantung pada bantuan pemerintah (top-down) daripada kebutuhan pasar nyata, sehingga saat bantuan berhenti, usaha sulit bertahan secara mandiri.	1. Penerbitan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan usaha. 2. Mandat Sinergi (BUMDes x Koperasi): Untuk menghindari tumpang tindih, BUMDesa diarahkan mengelola aset strategis desa sementara Kopdes fokus pada pemberdayaan anggota. 3. Ancaman Sanksi Administratif: Bupati Gresik menegaskan komitmennya dengan memberikan "ancaman" tidak menandatangani Bantuan Keuangan (BK) Desa bagi Kades yang tidak serius mengelola Kopdes Merah Putih, guna menjamin komitmen pimpinan desa terhadap ROI usaha tersebut. 4. Pelatihan Pengurus: Melakukan Bimtek intensif bagi pengurus usaha desa untuk meningkatkan kemampuan analisis kelayakan bisnis agar setiap rupiah investasi memiliki proyeksi pengembalian yang jelas.
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan desa	Indeks profesionalitas aparatur pemerintah desa (indeks)	1. Kesenjangan Kualifikasi Pendidikan: Masih terdapat perangkat desa dengan latar belakang pendidikan yang belum sesuai dengan standar jabatan teknis (seperti bendahara atau operator sistem), yang memengaruhi skor dimensi Kualifikasi. 2. Lemahnya Literasi Digital & Administrasi: Banyaknya aplikasi baru (seperti Siskeudes Link dan sistem profil desa) tidak dibarengi dengan kecepatan adaptasi perangkat desa, menyebabkan keterlambatan laporan dan kesalahan input data. 3. Inkonsistensi Disiplin & Etika: Adanya kasus pemberhentian ASN/Aparatur di lingkungan Pemkab Gresik (tercatat 397 orang sepanjang 2025 karena berbagai sebab termasuk pelanggaran disiplin) menunjukkan tantangan besar dalam menjaga standar etika kerja. 4. Risiko Politisasi Jabatan: Pergantian kepemimpinan desa sering kali diikuti dengan pergeseran perangkat yang tidak berbasis kompetensi, sehingga merusak keberlanjutan profesionalisme yang telah dibangun.	1. Manajemen Talenta & Penilaian Kompetensi: Peluncuran Manajemen Talenta tahun 2025 ditujukan untuk memetakan kompetensi aparatur secara akurat, memastikan penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat (right man on the right place). 2. Bimtek Intensif Berkelanjutan: Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) yang difokuskan pada penguatan administrasi pemerintahan desa dan pencegahan penyimpangan pelayanan publik. 3. Optimalisasi Klinik Desaku: Menyediakan wadah konsultasi khusus bagi perangkat desa untuk memecahkan masalah operasional harian tanpa harus menunggu instruksi dari kabupaten. 4. Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Menetapkan target capaian SPM tahun 2025 sebagai indikator penilaian kinerja bagi kepala perangkat daerah dan desa.

E. ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ANALIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN 2025-2029	SOLUSI
Meningkatkan keberdayaan multidimensi kemasyarakatan desa	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan desa (%)	1. Validasi Data Terpadu (DTKS): Ketidakakuratan data di tingkat desa menyebabkan intervensi program (seperti bantuan sosial atau pemberdayaan) sering kali tidak tepat sasaran, yang berujung pada inefisiensi anggaran pengentasan kemiskinan. 2. Lemahnya Integrasi Lintas Sektor: Program pengentasan kemiskinan masih sering berjalan sendiri-sendiri antar organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga dampak kumulatif bagi warga miskin di desa menjadi kurang optimal. 3. Fokus pada Bantuan daripada Pemberdayaan: Masih tingginya persentase program yang bersifat karitatif (pemberian bantuan langsung) dibandingkan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang mampu menciptakan kemandirian finansial bagi keluarga miskin.	1. Sinergi Data (Single Data System): Kolaborasi antara Dinas PMD dan Dinas Sosial untuk memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program pengentasan kemiskinan lebih akurat. 2. Program Bunda Puspa: Penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan (KPM) untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin secara langsung. 3. Nawakarsa Award: Memberikan insentif bagi desa yang berhasil menginovasi potensi lokal untuk mengurangi angka kemiskinan, seperti transformasi wisata desa yang menyerap tenaga kerja lokal. 4. Evaluasi Melalui LP2KD: Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) secara berkala untuk memantau capaian indikator kinerja utama setiap desa.
	Rasio jaminan sosial ketenagakerjaan ekosistem desa (rasio)	1. Ketidaktertiban Unit Pendukung: Masih ditemukan unit layanan di desa (seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) yang belum tertib mendaftarkan anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan. 2. Cakupan Pekerja Rentan: Rasio kepesertaan bagi ketua RT, RW, dan anggota BPD masih dalam tahap akselerasi dan belum merata di seluruh desa. 3. Sinkronisasi Data: Adanya ketidaksesuaian data antara jumlah pekerja riil di ekosistem desa dengan data kepesertaan aktif, yang memerlukan sinkronisasi intensif antara 300+ Sekdes dengan BPJS Ketenagakerjaan. 4. Kapasitas Anggaran Desa: Beberapa desa masih ragu mengalokasikan dana untuk iuran pekerja rentan karena khawatir akan beban jangka panjang pada APBDes.	1. Regulasi & Instruksi Bupati: Penerbitan Keputusan Bupati Gresik Nomor 560 Tahun 2025 yang mewajibkan pemberian perlindungan jaminan sosial bagi nelayan, petani, dan pekerja rentan desa melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). 2. Integrasi Penilaian Nawakarsa: Kepatuhan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh elemen desa (BPD, RT, RW) kini menjadi salah satu indikator utama dalam Penilaian Desa Nawakarsa 2025, yang menentukan pemberian insentif bagi desa. 3. Monitoring Efektivitas (Monev): Penyelenggaraan forum sinkronisasi data secara berkala untuk memastikan setiap pekerja di ekosistem desa, termasuk relawan program MBG, terproteksi secara sah. 4. Dukungan CSR & Sektor Swasta: Mendorong perusahaan di sekitar wilayah industri Gresik untuk mengarahkan dana CSR guna membantu premi BPJS bagi pekerja rentan di desa-desa lingkaran industri.

F. ALOKASI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT KOEFISIENSI (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes Nomor 2 Tahun 2016	100%	100%	100%	18.822.436.683,88	17.175.600.308,48	91.25%	8.75%

F. ALOKASI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT KOEFISIENSI (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi	Return of aset Rasio Pendapat Persentase desa Return of investme nt usaha desa	100%	100%	100%	18.822.436.683,88	17.175.600.308,48	91.25%	8.75%
2	Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan	Indeks profesionalitas aparatur pemerintah desa (indeks)							
3	Meningkatkan keberdayaan multidimensi	Realisasi pelaksanaan program Rasio							
		Indeks profesionalitas aparatur pemerintah desa (indeks)							

G. EFEKTIVITAS PENGGUNA SUMBER DAYA

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	18.822.436.683.88	17.175.600.308.48	91.25%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa	Return of aset usaha desa (Bumdesa dan kopertasi merah putih) (%)	18.822.436.683,88	17.175.600.308,48	91.25%
	Rasio Pendapatan asli Desa (Rasio)			
	Persentase desa mandiri (%)			
	Return og investment usaha desa (Bumdesa dan koperasi merah putih)			
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan desa	Indeks profesionalitas aparatur pemerintah desa (indeks)	18.822.436.683,88	17.175.600.308,48	91.25%
Meningkatkan keberdayaan multidimensi kemasyarakatan desa	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan desa (%)			
	Rasio jaminan sosial ketenagakerjaan ekosistem desa (rasio)			

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Pagu anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebesar Rp.18.822.436.683.88 dan terealisasi sebesar Rp.17.175.600.308,48 atau 91.25% capaian tersebut termasuk kategori “ SANGAT TINGGI”

G. EFEKTIVITAS PENGGUNA SUMBER DAYA

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFESIENSI
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	100%	91.25%	8.75%
Kategori		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFESIENSI
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa	Return of aset usaha desa (Bumdesa dan kopertasi merah putih) (%)	100%	91.25%	8.75%
	Rasio Pendapatan asli Desa (Rasio)			
	Persentase desa mandiri (%)			
	Return og investment usaha desa (Bumdesa dan koperasi merah putih)			
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan desa	Indeks profesionalitas aparatur pemerintah desa (indeks)			
Meningkatkan keberdayaan multidimensi kemasyarakatan desa	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan desa (%)			
	Rasio jaminan sosial ketenagakerjaan ekosistem desa (rasio)			
Kategori		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. . Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

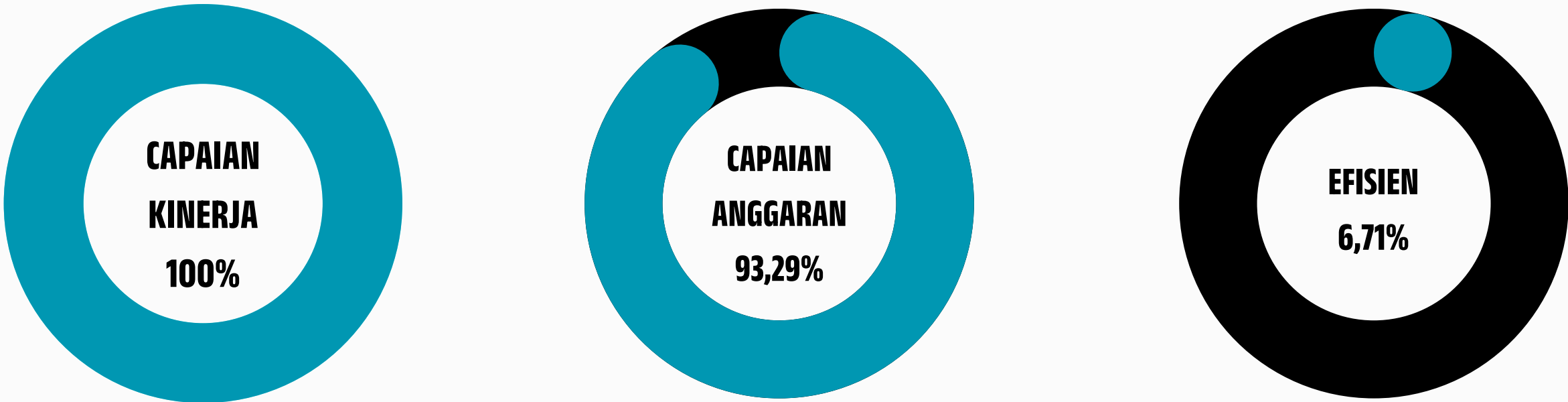
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan mengacu pada rumus tersebut maka diperoleh efisiensi sebagai berikut :

$$E = \frac{18.822.436.683,88}{17.175.600.308,48} \times 100\%$$
$$= 8.75\%$$

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 91.25% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan efisiensi sebesar 8.75%.



Sasaran I Mewujudkan Desa Mandiri 2021-2026		
NO	Indikator Kinerja Utama	Program
1	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes Nomor 2 Tahun 2016	1. Program Penataan Desa 2. Porgram Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Sasaran I Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa 2025-2029		
NO	Indikator Kinerja Utama	Program
1	Return of aset usaha desa (Bumdesa dan kopertasi merah putih) (%)	1. Program Penataan Desa 2. Porgram Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2	Rasio Pendapatan asli Desa (Rasio)	1. Porgram Peningkatan Kerjasama Desa 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

H. ANALIS PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran I
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi daerah dan desa
2025-2029

NO	Indikator Kinerja Utama	Program
3	Persentase desa mandiri (%)	1. Program Penataan Desa 2. Pogram Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4	Return of investment usaha desa (Bumdesa dan koperasi merah putih)	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran II
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan desa
2025-2029

NO	Indikator Kinerja Utama	Program
1	Indeks profesionalitas aparatur pemerintah desa (indeks)	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran III Meningkatkan keberdayaan multidimensi kemasyarakatan desa 2025-2029		
NO	Indikator Kinerja Utama	Program
1	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan desa (%)	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2	Rasio jaminan sosial ketenagakerjaan ekosistem desa (rasio)	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, terdapat 7 (tujuh) IKU dengan kategori Sangat Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan Kategori Sangat Tinggi.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

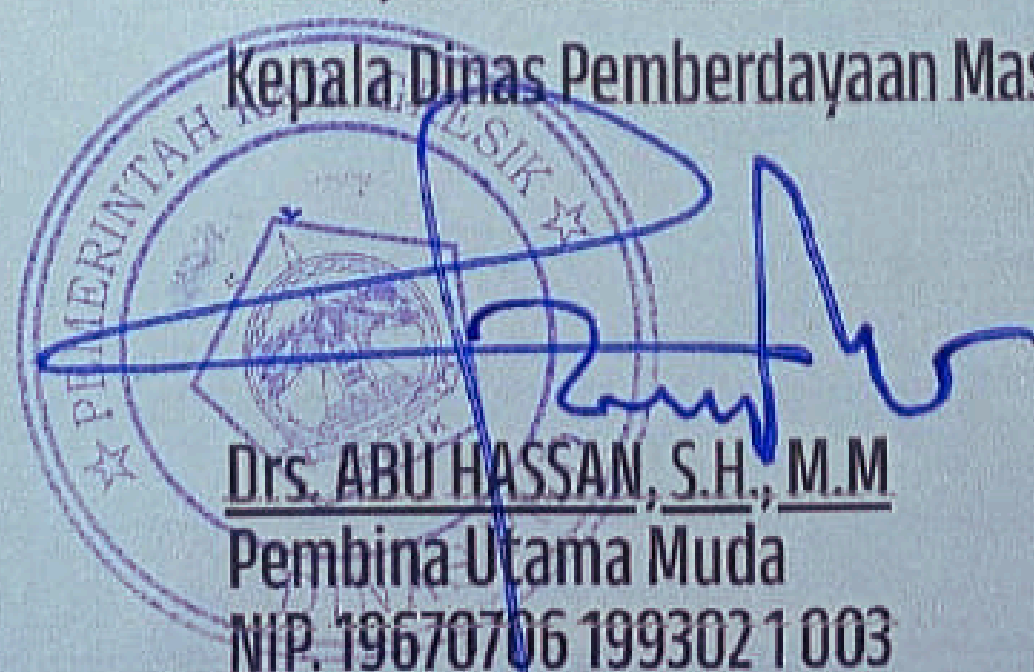
Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2025. Laporan Kinerja untuk menyajikan satu informasi atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan tingkat capaian kinerja, sasaran strategis, capaian keberhasilan / kendala serta solusi dalam pelaksanaan program kegiatan dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 18.822.426.683,88,- Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 17.175.600.308,43,- atau 91.25%.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik selama Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik 2025-2029 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 91.25% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan efisiensi sebesar 8.75%.

Gresik, 02 Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik



Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Anggaran Dana Desa (DD) 2026:

Mengingat proyeksi Dana Desa 2026 turun drastis, Dinas PMD harus menekankan kepada desa agar selektif memilih skala prioritas, fokus pada infrastruktur dasar dan layanan penting.

2. Penguatan BUMDes dan Pemberdayaan Ekonomi:

Mendorong BUMDes untuk lebih mandiri dan inovatif dalam menciptakan PADesa, tidak sekadar mengandalkan bantuan fisik.

3. Peningkatan Digitalisasi (Smart Village):

Mengakselerasi penggunaan aplikasi sistem keuangan dan administrasi desa untuk meminimalisir kesalahan pengelolaan dan meningkatkan transparansi.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Desa:

Mengintensifkan pelatihan perangkat desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan, selaras dengan tujuan Renstra 2025-2029.

5. Monitoring dan Evaluasi Ketat:

Meningkatkan intensitas pendampingan dan evaluasi kinerja desa (SDGs Desa) secara berkala agar target kinerja tercapai.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 6 Januari 2025
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Mewujudkan Desa Mandiri	1	Persentase Desa Mandiri dan Maju	100 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,080,669,713.16	APBD
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 203,019,937.00	APBD
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp. 82,023,883.00	APBD
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 9,536,137,350.00	APBD
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 2,110,531,808.00	APBD
Jumlah			Rp. 18,012,382,691.16	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 6 Januari 2025
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK



FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



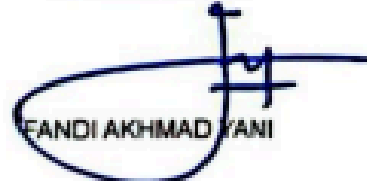
Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan Desa.	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa	60
2	Meningkatkan Keberdayaan Multidimensi Kemasyarakatan Desa.	1	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa	91.81 %
		2	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa	0.84
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi Daerah dan Desa.	1	Return on Asset Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih)	2.09 %
		2	Rasio Pendapatan Asli Desa	0.0542
		3	Persentase Desa Mandiri	47.58 %
		4	Return on Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih)	25.29 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,275,280,697.21	PAPBD
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 184,869,800.00	PAPBD
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp. 32,932,000.00	PAPBD
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 11,016,075,086.67	PAPBD
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 2,313,279,100.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 18,822,436,683.88	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK



FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003